

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan pada saat ini, pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Pemerintahan merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Guna mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya perbaikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat berguna bagi para pengguna atau *stakeholder*, terutama transparansi kepada masyarakat. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab pengelola organisasi. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Selain sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan-

nya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Terdapat empat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Undang-Undang No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan bisa dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam suatu pemerintahan, tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten guna memperoleh laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya

manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Menurut Mardiasmo (2002:146) sumber daya manusia telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya . Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan.

Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas baik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah

di Indonesia. Menurut Nordiawan, Deddi (2006:25) standar akuntansi pemerintah diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen – departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Selain SAP, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern berfungsi memberikan keyakinan tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika pengendalian intern lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. Menurut Mahmudi (2007:27) untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam menyusun laporan keuangan maka dibutuhkan dukungan atasan. Dukungan manajemen puncak merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Seorang pegawai yang bekerja dalam pembuatan laporan keuangan tidak lepas dari dukungan. Apabila tidak ada dukungan dari atasan, maka akan terjadi rendahnya kualitas dalam pembuatan laporan keuangan begitu pula sebaliknya. Dukungan dari atasan yang diberikan kepada pegawai bisa berupa motivasi, pengawasan kerja, maupun pelatihan kepada pegawai. Semakin baik dukungan yang diberikan atasan kepada pegawai diharapkan semakin baik pula laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya dukungan atasan maka karyawan bisa bekerja dengan baik sehingga kinerja karyawan meningkat dan mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan akan lebih baik.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Sudiarianti, dkk (2015) mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu dukungan manajemen puncak, serta lingkup penelitian

ini adalah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Persepsi Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini dapat memberikan gagasan tentang kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan dukungan manajemen puncak sebagai langkah perbaikan bagi pemerintah daerah di masing-masing OPD dalam menyusun laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai penelitian terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature dalam meleksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.

4. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana tiap-tiap bab memberikan gambaran mengenai masalah yang dibahas dan dapat diketahui secara jelas mengenai isi skripsi ini. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah yaitu meliputi masalah-masalah yang melandasi penelitian ini. Selanjutnya, bab ini membahas tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis. Teori-

teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lain yang relevan dan valid.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Bab IV merupakan hasil pembahasan yang menjelaskan mengenai pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, pengujian data, dan analisis data penelitian.

Bab V merupakan penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.